

Mengulang Kesalahan Serupa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) akhirnya mengeluarkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan BPK RI itu jelas bukan kabar baik.

Sebab selama dua tahun berturut-turut Pemprov Kalbar mendapatkan penilaian sama. Apalagi penyebabnya juga sama, karena aset tidak diurus dengan serius. Bahkan anggota BPK RI, Rizal Djalil, mengakui penilaian WDP diberikan akibat para SKPD yang kurang bersungguh-sungguh menyelesaikan kasus aset.

Padahal menurut Rizal Djalil, jika memang ada kemauan menuntaskan administrasi aset tidaklah rumit. Karena tidak ada keseriusan, hingga pengurusan aset menggantung sampai sekarang.

Memang belum tuntasnya pengurusan sertifikat aset tak lepas dari tanggungjawab Sekda dan seluruh SKPD. Apalagi alasan tidak bisa membuat sertifikat, karena sibuk. Wajar kalau akhirnya, Rizal meminta pada Gubernur untuk bersikap tegas dalam mengurus persoalan tersebut.

Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin LHP Pemprov Kalbar tahun 2012 nanti kembali mendapatkan penilaian WDP. "Tahun depan jelas kita sangat menginginkan, Kalbar bisa memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP)," terang Rizal.

Peringatan yang disampaikan BPK RI tentu bukan tanpa alasan. Sebab, jika persoalan pengurusan sertifikat aset dibiarkan berlarut-larut seperti sekarang, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kemudian hari.

Keseriusan semua pihak diperlukan, termasuk menyusun action plan terhadap kasus-kasus aset yang masih menggantal yang berpengaruh pada hasil pemeriksaan keuangan. Sehingga tidak diperlukan lagi perlu panitia khusus (Pansus) yang akhirnya mengurus uang negara.

Sebab diketahui bersama, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk membiayai kerja sebuah Pansus. Padahal Pansus yang dibentuk, belum tentu bisa menyelesaikan sejumlah persoalan yang kini terjadi.

Namun bila persoalan itu terus dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin pembentukan Pansus menjadi sebuah jawaban untuk memecahkan kebutuhan yang terjadi. Kita semua tentu berharap, LHP Pemprov Kalbar tahun 2012 nanti bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Karena kesalahan serupa tidak sewajarnya terus diulangi. Sebab kesalahan pertama bisa saja dikarenakan khilaf. Kesalahan kedua bisa karena lupa. Tapi kesalahan ketiga, sudah termasuk kelalaian yang bisa saja akibat kesengajaan atau ketidakeriusan. (*)